

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhie, Brahmana dan Hasan Basri Nata Menggala, 2002, *Reformasi pertanahan : pemberdayaan hak-hak atas tanah ditinjau dari segi aspek hukum, sosial, politik, ekonomi, hankam, teknis, agama dan budaya*, Bandung: Mandar Maju.
- Badan Pertanahan Nasional, ***Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014***, (Jakarta: BPN RI, 2010).
- Chandra,S, 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Grasindo.
- Effendie, Bachtiar, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan – peraturan pelaksanaannya*, Bandung: Alumni.
- F.X. Sumarja, 2012, ***Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing***, Indepth Publising, Bandar Lampung.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang – undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Ed.rev., Cet.ke-8, Jakarta: Djambatan
- Ismaya, Samun, 2013, *Hukum Admministrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Joyo Winoto, “*Reforma Agraria*” *Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan rakyat, Makalah Seminar Nasional, Penguatan Hak Kepada Rakyat dalam Reforma Agraria Melalui Persamaan Hak Memperoleh Hak Atas Tanah*, (Magister Kenotariatan Undip, Kanwil BPN Propinsi Jateng, KAPTI & IMMK, Semarang, 15 mei 2008).
- KH. Ali Yafie, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Mizan, Bandung
- Mhd. Yamin Lubis, Abd. Rahim Lubis, 2008, “***Hukum Pendaftaran Tanah***”, Bandung: Mandar Maju. Nolind, Indra, 2011. ***UUD 1945...***, Pustaka Tanah Air, Bandung.
- Panggabean, H.P , 2014, ***Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia***, PT. Alumni, Jakarta
- Parlindungan, A.P, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Prakoso, Djoko, Budiman Ari Perwanto, 1985, *Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia

- R. Soehadi, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang – undang Pokok Agraria*, Usana Offset Printing, Surabaya.
- Prima, Andre Ramanda, 2014, *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan*, Tesis, Universitas Andalas
- Ridwan, 2010, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta
- Triono, Dwi Condro, 2011, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, Irtikaz, Yogyakarta
- Usman, Muslih, 1997, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Rajawali Pers, Jakarta
- Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salman , Otje dan Anton Sutanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Ed.I. Cet Ke.1., Jakarta: Kencana.
- Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Singaribun, Masri dan Sofian Efendi, 1989. *Metode Penelitian Surve*, LP3ES, Jakarta
- Soejono, Abdurrahman, 1998, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soejono, Abdurrahman, 1997, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar (Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penerbitan)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Surahmat, Winarno, 1982. *Pengantar Metodologi Ilmiah*, CV. Tarsito, Bandung.
- Wardiono, Kelik, 2005, *Metodelogi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal)*, Surakarta: UMS Press.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang – undang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka

Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria.TAP MPR IX/MPR/2001

Lain – Lain

<http://www.hukum-ut.id/2017/03/hukum-administrasi-pertanahan-agraria.html>

[http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/10/343341/pegawai-bpn-kalbar-ditangkap-karena-palsukan-sertifikat-tanah,](http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/10/343341/pegawai-bpn-kalbar-ditangkap-karena-palsukan-sertifikat-tanah)

[http://www.spi.or.id/?p=1834,](http://www.spi.or.id/?p=1834)

<http://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164>

<http://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/867/sosialisasi-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap>

<https://www.atrbpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas-ATR-BPN>

Wawancara

Mujiono A.Ptnh, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten blora, Wawancara Pribadi, Blora, 18 Desember 2019, Pukul 10.45

Sukur A.Ptnh.M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, *Wawancara Pribadi*, Blora, 18 Desember 2019, Pukul 11.05

Sriyono, A.Ptnh, Kepala subseksi penetapan hak, *Wawancara Pribadi*, Blora, 18 Desember 2019, Pukul 09.20